

Received : June 2021	Accepted: July 2021	Published : July 2021
----------------------	---------------------	-----------------------

Evaluasi Ketimpangan Wilayah di Kabupaten Berau dengan Pendekatan Kapabilitas

Dwi Fitriyaningsih^{1*}, Retno Widodo Dwi Pramono²

^{1,2}Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada

*Email: dwi.urplan@gmail.com

Abstract

Development in Indonesia is marked by the problem of inequality between regions, both between urban and rural areas, between provinces, between districts, as well as between parts of the region within a district/city. Measurement of inequality is often done to evaluate development performance. In Indonesia, inequality between regions is often interpreted as a condition of income differences between regions, so in measuring inequality often using data of Gross Domestic Regional Product (GDRP). However, using GDRP approach in evaluating inequality has drawbacks, firstly because of the unavailability of sub-district data of GDRP in most areas. Second, the calculation of inequality using GDRP only attention to the economic dimensions of a region, does not attention to geographical aspects, natural resources, infrastructure and natural resources. For this reason, a study was conducted that aims to evaluate the inequality between parts of region using a capability approach. This study uses a descriptive statistical analysis method, with the results showing that the inequality index in Berau Regency is 0.91, meaning that there is a high inequality between regions in Berau Regency. The capability factor that has a significant difference between rural and urban area is the Economic Institutional Assets (EIA) factors and Public Tangible Assets (PTA) factors.

Keywords: Urban, Rural, Inequality, Capabilities

Abstrak

Pembangunan di Indonesia diwarnai permasalahan ketimpangan antar wilayah, baik ketimpangan antara perkotaan dengan perdesaan, antarprovinsi, antarkabupaten, serta antara bagian wilayah dalam satu kabupaten/kota. Pengukuran ketimpangan sering dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan. Di Indonesia ketimpangan antarwilayah sering diartikan sebagai kondisi perbedaan pendapatan antarwilayah, maka dalam pengukuran ketimpangan sering menggunakan data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, penggunaan pendekatan PDRB dalam mengevaluasi ketimpangan memiliki kekurangan, pertama karena tidak tersedianya data PDRB kecamatan dan kelurahan di sebagian besar wilayah. Kedua, perhitungan ketimpangan menggunakan PDRB hanya memperhatikan dimensi ekonomi suatu wilayah, belum memperhatikan aspek geografis, sumberdaya alam, infrastruktur dan sumber daya alam. Untuk itu, dilakukan penelitian yang bertujuan mengevaluasi ketimpangan antar bagian wilayah menggunakan pendekatan kapabilitas. Penelitian ini menggunakan metode analisa statistikdeskriptif, dengan hasil menunjukkan bahwa indeks ketimpangan di Kabupaten Berau adalah sebesar 0,91, artinya terdapat ketimpangan yang tinggi antar bagian wilayah di Kabupaten Berau. Adapun faktor kapabilitas yang memiliki perbedaan signifikan antara bagian wilayah perdesaan dan bagian wilayah adalah faktor *Economic Institutional Assets* (EIA) dan *Public Tangible Assets* (PTA).

Kata kunci: Perkotaan, Perdesaan, Ketimpangan, Kapabilitas

1. Pendahuluan

Pembangunan di Indonesia merupakan serangkaian proses yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks memajukan kesejahteraan umum, pemerintah melakukan berbagai upaya melalui program pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang dimaksud adalah pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang tinggal di wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan (Rahman, 2018).

Dalam Laporan Analisa Ketimpangan Wilayah Tahun di Kalimantan Timur Tahun 2020, Bappeda Kalimantan Timur menjelaskan bahwa pembangunan di Indonesia juga diwarnai permasalahan ketimpangan antar wilayah. Rentang luas wilayah Indonesia yang cukup besar serta tidak meratanya pembangunan menyebabkan ketimpangan terjadi, baik antara perkotaan dengan perdesaan, antarprowinsi, antarkabupaten, serta antara kota dengan kabupaten.

Dalam Laporan Analisa Ketimpangan Wilayah di Kalimantan Timur Tahun 2020 juga disebutkan bahwa penduduk miskin di perdesaan Kalimantan Timur jumlahnya lebih tinggi dibanding jumlah penduduk miskin di perkotaan. Berdasarkan data jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur tahun 2019 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk miskin di perkotaan. Jumlah penduduk miskin di perdesaan adalah sebanyak 112,25 juta jiwa (9,31%) dan jumlah penduduk miskin di perkotaan adalah 107,67 juta jiwa (4,31%).

Sutarno & Kuncoro (2003) menjelaskan bahwa ketimpangan antarwilayah merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah. Ketimpangan disebabkan oleh adanya perbedaan potensi sumber daya alam dan perbedaan kondisi geografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda-beda. Selain itu juga dapat terjadi akibat adanya perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya arus mobilitas barang dan jasa, konsentrasi ekonomi kegiatan wilayah, serta alokasi dana pembangunan antar wilayah. Terjadinya ketimpangan antarwilayah ini berimplikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah.

Meskipun dalam dua dekade terakhir kondisi ekonomi yang impresif diraih oleh Indonesia, permasalahan ketimpangan masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan, terutama di wilayah perdesaan. Menurut Lembaga Penelitian Smeru Institut (Warda et al., 2019), tingkat kemiskinan yang tinggi, produktivitas sektor pertanian yang rendah, dan keterbatasan infrastruktur layanan dasar menjadi hambatan laten bagi wilayah perdesaan untuk memperkecil gap pertumbuhan pendapatan antara kelompok termiskin dengan kelompok dengan kesejahteraan lebih baik. Pengukuran ketimpangan sering dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan. Simbolon (2017) menjelaskan bahwa dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi bisa dilihat dari segi pendapatan perkapita penduduk antar wilayah. Di Indonesia ketimpangan antarwilayah sering diartikan sebagai kondisi perbedaan pendapatan antarwilayah, maka dalam pengukuran ketimpangan sering menggunakan data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

Perhitungan ketimpangan menggunakan pendekatan PDRB memiliki kelemahan, yaitu tidak tersedianya data PDRB kecamatan dan kelurahan di sebagian besar wilayah. Selain itu, data PDRB didapatkan dari perhitungan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Artinya perhitungan ketimpangan menggunakan PDRB hanya memperhatikan dimensi ekonomi suatu wilayah, belum merepresentasikan aspek geografis, sumberdaya alam, infrastruktur dan sumber daya alam.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan data lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan ketimpangan wilayah.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Firdaus (2013), bahwa kerangka pembangunan wilayah adalah bagaimana proses pembangunan dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat meningkatkan kapasitas lokal. Meskipun perubahan kapasitas tersebut secara mudah dapat diukur dengan pendapatan (produk domestik regional bruto/PDRB) per kapita, namun ukuran tersebut tidak dapat bersifat tunggal, karena mengandung beberapa kelemahan. Sehingga dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan wilayah, meningkatnya kapabilitas masyarakat setempat hendaknya yang menjadi indikator utama, bukan hanya berapa besar nilai tambah proses produksi yang dihasilkan; yang bisa jadi mengalir ke pihak-pihak di luar wilayah itu sendiri. Ukuran tersebut juga harus disertai dengan pemerataan, bukan terpusat pada beberapa orang atau golongan masyarakat saja.

Warda et al. (2019) berpendapat bahwa pada dasarnya ketimpangan adalah perbedaan tingkat pertumbuhan pendapatan antar kelompok kesejahteraan. Hal ini merupakan produk dari perbedaan penguasaan modal penghidupan atau kapabilitas yang dimiliki. Dalam kerangka modal penghidupan, ketimpangan antara wilayah perdesaan dan perkotaan tidak hanya dinilai sebagai kondisi lebarnya kesenjangan antara kondisi ekonomi masyarakat di desa dan masyarakat di kota, tetapi juga dilihat dari keadaan tidak optimalnya kapabilitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan menunjang penghidupan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, pengukuran ketimpangan wilayah dapat dilakukan dengan pendekatan kapabilitas.

Kapabilitas masyarakat yang tinggal di perdesaan dan perkotaan memiliki perbedaan. Tarigan (2003) menjelaskan bahwa perbedaan kapabilitas didasari adanya perbedaan potensi regional (sumber daya alam, sumber daya manusia, dana, lingkungan dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan dan struktur kegiatan masyarakat. Agar ketimpangan antara daerah perdesaan dan perkotaan dapat diperkecil, salah satu instrumen yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapabilitas masyarakat di perdesaan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian terkait kapabilitas masyarakat perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Berau.

Sen (2000) menekankan bahwa kapabilitas merupakan kemampuan untuk berfungsi (*ability to function*). Melalui pendekatan ini, kualitas hidup manusia dikaitkan dengan kemampuan mereka untuk melakukan sesuatu. Penilaian Kapabilitas merupakan proses untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, Pramono (2016) menjelaskan bahwa kapabilitas individu terbentuk karena adanya peran aset. Konsep manfaat yang tertanam dalam 'aset' merupakan konsep yang memasukkan unsur-unsur yang dianggap telah menyediakan kebutuhan saat ini dan dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan di masa depan. Aset berperan dalam menentukan tingkat kapabilitas karena tingkat ketersediaannya dan tingkat kontribusi (manfaat) bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi ketimpangan wilayah di Kabupaten Berau dengan pendekatan kapabilitas.

2. Metodologi

2.1 Unit Analisa dan Sampel Penelitian

Unit analisa dalam penelitian ini adalah kecamatan sebagai bagian wilayah Kabupaten Berau. Adapun responden dalam penelitian ini adalah individu yang kemudian hasil analisisnya diakumulasikan sebagai data kapabilitas kecamatan. Kriteria responden adalah masyarakat yang tinggal di Kabupaten Berau dan berusia diatas 18 tahun. Pemilihan responden dilakukan menggunakan *spatial random sampling*. *Spatial random sampling* merupakan metode penyusunan responden sebagai sampel penelitian secara acak namun memiliki frame tertentu yang dalam

penelitian ini berupa batas kecamatan. Bagian wilayah perkotaan berlokasi di Ibu Kota Kabupaten yaitu Kecamatan Tanjung Redeb dan bagian wilayah perdesaan berlokasi di kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Berau. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan mengacu pada rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- n : jumlah sampel
- N: jumlah populasi
- e : toleransi error

Dengan mengguankan toleransi error sebesar 0,1 pada rumus slovin, maka didapatkan jumlah sampel pada kawasan perkotaan minimal berjumlah 99 sampel dan kawasan perdesaan minimal berjumlah 99 sampel. Agar sampel tersebar secara merata, maka jumlah sampel akan dibagi sesuai dengan proporsi jumlah penduduk berdasarkan batas administrasi kecamatan. Adapun jumlah sampel yang akan digunakan adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

Unit Amatan	Jumlah Penduduk 2019 (jiwa)	Sampel Penelitian (jiwa)
Kawasan Perkotaan		
- Perkotaan Tanjung Redeb	67.816	29
Kawasan Perdesaan		
- Perdesaan Kelay	6.340	3
- Perdesaan Talisayan	11.939	5
- Perdesaan Tabalar	7.362	3
- Perdesaan Biduk-biduk	6.744	3
- Perdesaan Pulau Derawan	9.299	4
- Perdesaan Maratua	4.011	2
- Perdesaan Sambaliung	36.839	16
- Perdesaan Gunung Tabur	22.732	10
- Perdesaan Segah	11.330	5
- Perdesaan Teluk Bayur	31.088	13
- Perdesaan Batu Putih	8.834	4
- Perdesaan Biatan	8.023	3

Sumber: Hasil Analisis, 2021.



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Berau

2.2 Variabel Penelitian

Komponen aset dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu *Economic Institutional Assets* (EIA), *Public Tangible Assets* (PTA), *Social Institutional Assets* (SIA), *Individual Tangible Assets* (ITA) dan *Individual Intangible Assets* (IIA). Pengelompokan ini bertujuan untuk mengelompokkan variabel aset sesuai dengan variabel-variabel yang berakaitan atau memiliki kemiripan dengan variabel lainnya.

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka, komponen aset yang dapat digunakan dalam perhitungan kapabilitas antara lain:

Tabel 2 Kajian Teori Variabel yang Mempengaruhi Kapabilitas

Komponen Aset	Grup Faktor	Sumber
Akses ke pasar		JICA (2016)
Akses ke pekerjaan	<i>Economic</i>	Santipolvut (2014)
Akses ke sumber modal keuangan	<i>Institutional</i>	Santipolvut (2014)
Kemampuan memenuhi kebutuhan hidup	<i>Assets (EIA)</i>	OECD (2011) Santipolvut (2014)
Akses ke jalan arteri dan atau kolektor		JICA (2016)
Kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan		Santipolvut (2014)
Kawasan studi lingkungan	<i>Public Tangible</i>	JICA (2016)
Kawasan konservasi	<i>Assets (PTA)</i>	JICA (2016)
Fasilitas kesehatan		JICA (2016), Santipolvut (2014) , Raymond (2013)
Kualitas dan kuantitas air bersih		JICA (2016), OECD (2011)
Fasilitas pengelolaan limbah domestik		JICA (2016)
Fasilitas pendidikan		JICA (2016), Santipolvut (2014) , Raymond (2013)
Partisipasi dalam kegiatan masyarakat		Santipolvut (2014)
Kesetaraan		Santipolvut (2014) , JICA (2016)
Solidaritas masyarakat	<i>Social</i>	Raymond (2013), OECD (2011)
Kualitas pemerintahan	<i>Institutional</i>	Raymond (2013)
Kegiatan pelatihan manajemen organisasi	<i>Assets (SIA)</i>	JICA (2016)
Keamanan lingkungan sekitar		OECD (2011)
Kepemilikan lahan	<i>Individual</i>	OECD (2011)
Kepemilikan aset lain yang bukan lahan	<i>Tangible Assets</i>	OECD (2011)
Ketersediaan akses informasi	<i>(ITA)</i>	Santipolvut (2014)
Kecukupan gizi		OECD (2011)
Pengetahuan tentang kesehatan masyarakat		JICA (2016)
Moralitas / etika		Santipolvut (2014)
Kemampuan mengelola SDM	<i>Individual</i>	Santipolvut (2014) , Raymond (2013)
Kemampuan leadership	<i>Intangible</i>	Raymond (2013)
Kemampuan komunikasi	<i>Assets (IIA)</i>	Raymond (2013), Pramono (2016)
Akses untuk memberikan aspirasi ke pemerintah		OECD (2011)
Pengetahuan tentang SDA		Raymond (2013)

Sumber: Hasil Tinjauan Pusataka, 2021

2.3 Perhitungan Tingkat Kesejahteraan Bagian wilayah dengan pendekatan Kapabilitas

Pramono (2016) mengembangkan perangkat dalam skala yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan kuantitatif yang pada dasarnya bersifat abstrak dan relatif yaitu *Community Capability Index* (CCI). CCI dihitung berdasarkan persepsi masyarakat atas asetnya

termasuk kondisi pribadi dan lingkungan tempat tinggalnya. Alat evaluasi CCI berupa kuesioner yang mencakup 29 komponen aset termasuk aset fisik dan non fisik.

Indeks kapabilitas ditentukan oleh skor persepsi masyarakat tentang ketersediaan aset dan fungsi aset tersebut. Ketersediaan aset (*Asset Availability*) yang ditulis dengan simbol “A” menggambarkan persepsi masyarakat tentang ketersediaan dan kualitas aset yang terdapat di kecamatan tempat domisili mereka. Sedangkan fungsi aset (*Asset Function*) yang ditulis dengan symbol “F”, menggambarkan persepsi masyarakat terhadap fungsi atau manfaat dari ketersediaan dan kualitas aset.

Dalam kuisioner penelitian, responden diminta memberi penilaian terhadap ketersediaan aset dan fungsi aset pada masing-masing variabel. Rentang nilai yang dapat diberikan berkisar antara - 2 hingga 2 sesuai persepsi masing-masing responden. Adapun kategori penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Skala Penilaian Kapabilitas

Skala persepsi terhadap ketersediaan Aset (A)	Skala persepsi terhadap fungsi aset (F)
<ul style="list-style-type: none"> • Sangat baik (skor 2) • Baik (skor 1) • Cukup baik (skor 0) • Kurang (skor -1) • Sangat kurang (skor -2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat membantu (skor 2) • Membantu (skor 1) • Tidak membantu (skor 0) • Menghambat (skor -1) • Sangat menghambat (skor -2)

Sumber: Pramono, 2016.

Rumus kapabilitas masyarakat ditulis dalam rumus berikut:

$$C = AF^2 \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

C = Kapabilitas

A = Nilai rata-rata persepsi dari ketersediaan aset

F = Nilai rata-rata persepsi dari fungsi aset

2.4 Evaluasi Ketimpangan Bagian wilayah dengan pendekatan Kapabilitas

Dalam penelitian ini ketimpangan wilayah diukur dengan formula index ketimpangan yang dirumuskan Williamson (1965). Namun variabel Y yang digunakan adalah nilai kapabilitas masing-masing bagian wilayah di Kabupaten Berau dari hasil tahapan analisa sebelumnya. Rumus yang digunakan adalah:

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i / n}}{Y} \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

IW : Index ketimpangan

Y_i : CCI di kecamatan i

Y : CCI Kabupaten

f_i : Jumlah penduduk kecamatan i

n : Jumlah penduduk seluruh wilayah

Hasil pengukuran dari indeks ketimpangan ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau 0 < IW < 1, jika Indeks ketimpangan semakin mendekati angka 0 maka ketimpangan antar daerah/wilayah adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi merata dan sebaliknya jika indeks

ketimpangan semakin mendekati angka 1 maka ketimpangan semakin tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak merata.

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Variasi *Community Capability Index* (CCI)

Identifikasi kapabilitas masyarakat di Kabupaten Berau dilakukan dengan menggunakan perhitungan kapabilitas menggunakan *Community Capability Index* yang dikemukakan oleh Pramono (2016). Adapun variabel yang digunakan dalam proses perhitungan adalah 29 variabel yang telah dikelompokkan berdasarkan hasil analisa faktor sebelumnya.

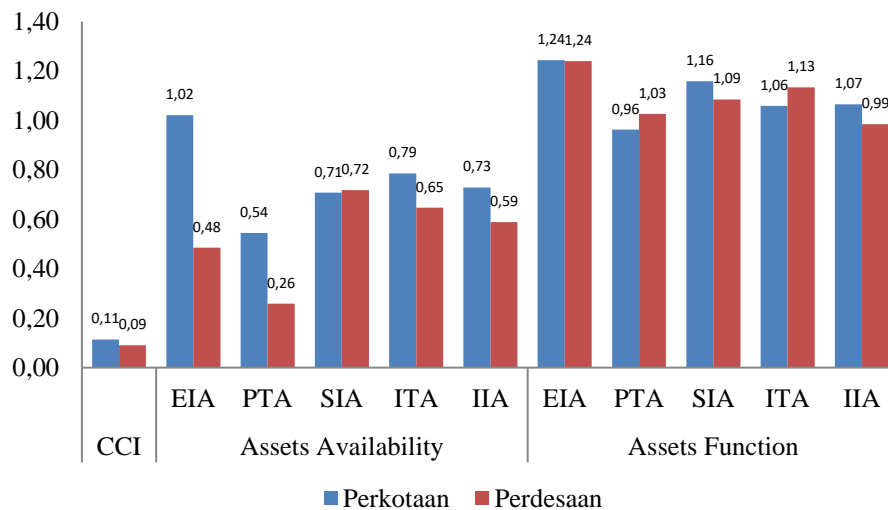
Kapabilitas masyarakat perkotaan ditunjukkan dengan kapabilitas masyarakat perkotaan Tanjung Redeb. Sedangkan kapabilitas masyarakat perdesaan diidentifikasi kapabilitas masyarakat di perdesaan Batu Putih, perdesaan Biatan, perdesaan Biduk-Biduk, perdesaan Gunung Tabur, perdesaan Kelay, perdesaan Maratua, perdesaan Pulau Derawan, perdesaan Sambaliung, perdesaan Segah, perdesaan Tabalar, perdesaan Talisayan, dan perdesaan Teluk Bayur. Berikut merupakan hasil perhitungan *Community Capability Index* di Kabupaten Berau.

Tabel 1. Nilai *Community Capability Index* (CCI)

Village		Community Assets : IIA, ITA, PTA, SIA, EIA													
		Assets Availability					Av,	Assets Function					Av,	C	CCI
		EIA	PT A	SIA	ITA	IIA		EIA	PT A	SIA	ITA	IIA			
Range		-2 to 2						-2 to 2							-1 to 1
Perkotaan		1,02	0,54	0,71	0,79	0,73	0,76	1,24	0,96	1,16	1,06	1,07	1,10	0,91	0,11
1	Perkotaan Tanjung Redeb	1,02	0,54	0,71	0,79	0,73	0,76	1,24	0,96	1,16	1,06	1,07	1,10	0,91	0,11
Perdesaan		0,48	0,26	0,72	0,65	0,59	0,54	1,24	1,03	1,09	1,13	0,99	1,09	0,72	0,09
1	Perdesaan Batu Putih	0,31	0,28	0,88	0,42	0,38	0,45	1,13	0,72	0,38	0,92	0,63	0,75	0,26	0,03
2	Perdesaan Biatan	0,58	0,50	0,56	0,78	0,83	0,65	1,58	1,17	1,33	1,22	1,04	1,27	1,05	0,13
3	Perdesaan Biduk-Biduk	0,56	- 0,06	0,00	0,33	0,06	0,18	0,94	0,88	1,21	1,33	1,44	1,16	0,24	0,03
4	Perdesaan Gunung Tabur	1,00	0,54	0,83	1,03	0,85	0,85	1,28	1,16	1,37	1,37	1,25	1,28	1,40	0,18
5	Perdesaan Kelay	0,25	0,71	1,11	0,33	0,58	0,60	1,33	1,33	1,33	1,33	1,17	1,30	1,01	0,13
6	Perdesaan Maratua	0,13	- 0,44	0,92	1,50	0,88	0,60	1,50	1,38	1,08	1,00	1,13	1,22	0,88	0,11
7	Perdesaan Pulau Derawan	0,06	- 0,03	1,08	0,75	0,47	0,47	1,25	1,06	1,04	1,08	0,09	0,91	0,38	0,05
8	Perdesaan Sambaliung	0,55	0,36	0,51	0,68	0,42	0,50	1,26	0,96	1,25	1,14	1,10	1,14	0,66	0,08
9	Perdesaan Segah	- 0,10	- 0,28	0,23	- 0,07	0,08	- 0,03	1,00	0,73	0,73	0,87	0,85	0,84	- 0,02	0,00
10	Perdesaan Tabalar	0,42	0,29	0,72	0,33	0,83	0,52	1,00	0,71	0,83	1,11	0,75	0,88	0,40	0,05

Village		Community Assets : IIA, ITA, PTA, SIA, EIA													
		Assets Availability					Av,	Assets Function					Av,	C	CCI
		EIA	PT A	SIA	ITA	IIA		EIA	PT A	SIA	ITA	IIA			
11	Perdesaan Talisayan	0,95	0,75	1,03	0,80	0,88	0,88	1,15	1,05	1,00	1,00	1,05	1,05	0,97	0,12
12	Perdesaan Teluk Bayur	1,11	0,48	0,75	0,88	0,81	0,81	1,47	1,19	1,47	1,23	1,34	1,34	1,44	0,18

Sumber: Hasil Analisa, 2021



Gambar 2. Grafik Nilai Community Capability Index (CCI) di Kabupaten Berau

Assets availability

Nilai *assets availability* menggambarkan ketersediaan dan kualitas aset di masing-masing bagian wilayah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, diketahui bahwa nilai *assets availability* antara bagian wilayah perdesaan dan perkotaan memiliki nilai yang tidak jauh berbeda untuk kelompok aset *Social Institutional Assets* (SIA), *Individual Tangible Assets* (ITA) dan *Individual Intangible Assets* (IIA), sedangkan untuk kelompok aset *Economic Institutional Assets* (EIA) dan *Public Tangible Assets* (PTA) memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

Kelompok aset *Economic Institutional Assets* (EIA) di bagian wilayah perkotaan memiliki nilai *assets availability* sebesar 1,02, sedangkan di bagian wilayah perdesaan memiliki nilai 0,48. Perbedaan ini disebabkan jauhnya jarak wilayah perdesaan ke pasar regional di pusat kabupaten, akses sumber modal keuangan yang terbatas di wilayah perdesaan dan jenis pekerjaan di perdesaan yang terbatas. Adapun nilai *assets availability* kelompok aset *Public Tangible Assets* (PTA) di bagian wilayah perkotaan bernilai 0,54, sedangkan di bagian wilayah perdesaan memiliki nilai 0,26. *Assets availability* kelompok aset *Public Tangible Assets* (PTA) yang bernilai dibawah 1 (nilai index maksimal 2) ini menunjukkan bahwa aset publik baik di perdesaan maupun di perkotaan ketersediaan dan kualitasnya masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun rendahnya nilai *assets availability* kelompok aset *Public Tangible Assets* (PTA) di perdesaan dibanding wilayah perkotaan disebabkan karena kurangnya ketersediaan dan kualitas fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, air bersih dan pengelolaan limbah domestik di wilayah perdesaan.

Assets Function

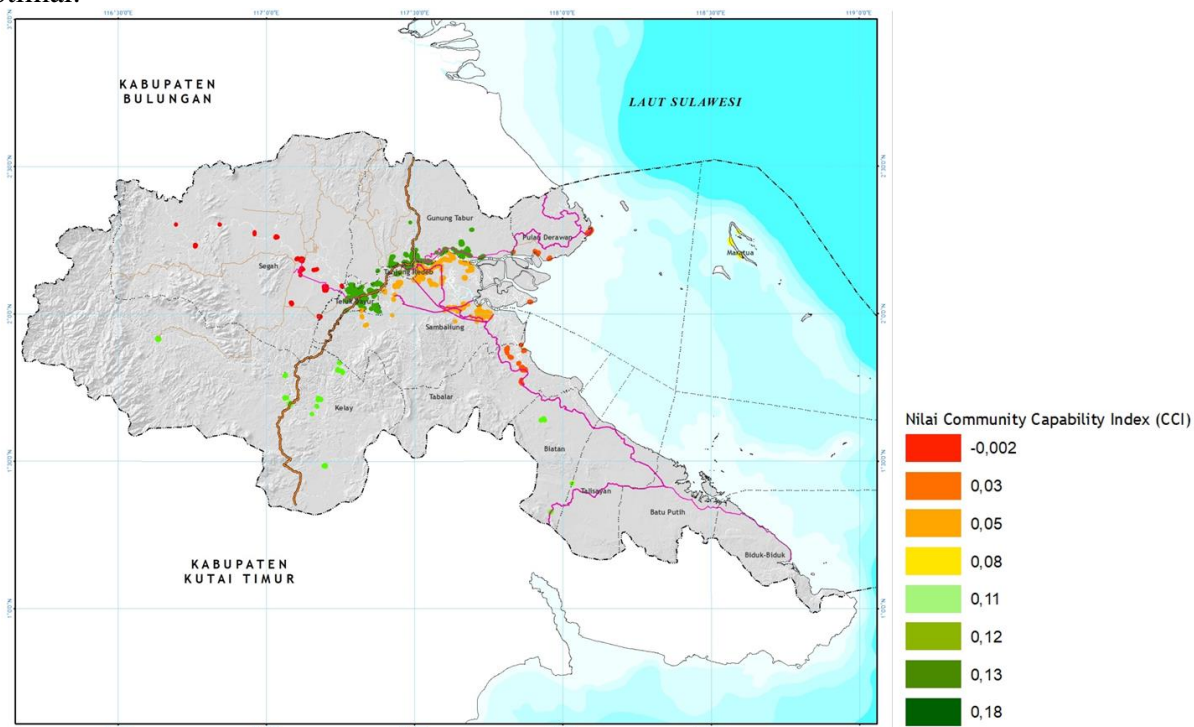
Nilai *assets function* menggambarkan seberapa besar fungsi aset dalam mendukung peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Diseluruh bagian wilayah Kabupaten Berau, baik di perdesaan dan perkotaan menunjukkan nilai *assets function* yang tinggi untuk seluruh kelompok aset, artinya masyarakat memiliki persepsi bahwa seluruh aset memiliki fungsi yang baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kelompok aset yang memiliki nilai *assets function* paling tinggi adalah *Economic Institutional Assets* (EIA) yaitu sebesar 1,24 (nilai untuk bagian wilayah perkotaan dan perdesaan). Hal ini menunjukkan bahwa dalam persepsi masyarakat, aset yang paling mempengaruhi kesejahteraan masyarakat adalah aset ekonomi, yaitu akses ke pasar, akses ke pekerjaan, akses ke sumber modal keuangan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup.

Community Capability Index (CCI)

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, diketahui bahwa nilai *Community Capability Index* (CCI) di bagian wilayah perkotaan Kabupaten Berau lebih besar dibanding bagian wilayah perdesaan Kabupaten Berau. Nilai CCI di bagian wilayah perkotaan adalah 0,11 sedangkan nilai CCI di bagian wilayah perdesaan sebesar 0,09. Nilai CCI di bagian wilayah perdesaan merupakan nilai rata-rata dari nilai CCI dari 12 perdesaan yang ada di Kabupaten Berau sebagaimana terdapat dalam Tabel 6 diatas. Perbedaan antara nilai CCI di perdesaan dan di perkotaan ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan kapabilitas masyarakat.

Secara umum baik di perdesaan maupun perkotaan, persepsi masyarakat tentang ketersediaan aset lebih rendah dibanding persepsi masyarakat terhadap fungsi aset, artinya bagi masyarakat fungsi aset sangat penting tetapi ketersediaannya di masing-masing bagian wilayah masih belum optimal.



Gambar 3. Peta Nilai CCI masyarakat Kabupaten Berau

Apabila memperhatikan sebaran spasialnya, kecamatan dengan nilai rata-rata CCI tertinggi adalah Kecamatan Gunung Tabur dan Kecamatan Teluk Bayur dengan nilai CCI sebesar 0,18. Dua kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan bagian wilayah perkotaan Tanjung Redeb. Hal ini menunjukkan bahwa bagian wilayah yang dekat dengan perkotaan maka memiliki kapabilitas yang tinggi.

3.2 Evaluasi Ketimpangan Bagian wilayah dengan pendekatan Kapabilitas

Hasil pengukuran dari indeks ketimpangan menunjukkan nilai indeks sebesar 0,91. Nilai indeks yang mendekati 1 ini menunjukkan bahwa ketimpangan antar bagian wilayah di Kabupaten Berau tergolong tinggi atau pertumbuhan antar daerah tidak merata.

Tabel 2. Indeks Ketimpangan Bagian Wilayah di Kabupaten Berau

Kecamatan	Jumlah Penduduk	CCI
Perkotaan Tanjung Redeb	67.816	0,114
Perdesaan Batu Putih	8.834	0,032
Perdesaan Biatan	8.034	0,131
Perdesaan Biduk-Biduk	6.744	0,030
Perdesaan Gunung Tabur	22.732	0,175
Perdesaan Kelay	6.340	0,126
Perdesaan Maratua	4.011	0,110
Perdesaan Pulau Derawan	9.229	0,048
Perdesaan Sambaliung	36.839	0,082
Perdesaan Segah	11.330	-0,002
Perdesaan Tabalar	7.362	0,050
Perdesaan Talisayan	11.939	0,122
Perdesaan Teluk Bayur	31.088	0,180
Kabupaten Berau	232.298	1,199
Indeks Ketimpangan		0,910

Indeks ketimpangan wilayah yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Berau masih terjadi ketimpangan antara bagian wilayah perkotaan dan bagian wilayah perdesaan. Dengan memperhatikan faktor kapabilitas yang memiliki nilai cukup berbeda antara bagian perkotaan dan perdesaan dapat terlihat faktor yang berkontribusi meningkatkan ketimpangan antar bagian wilayah. Berdasarkan hasil analisa pada masing-masing komponen *Community Capability Index* (CCI) terlihat bahwa ketersediaan aset pada faktor *Social Institutional Assets* (SIA), *Individual Tangible Assets* (ITA) dan *Individual Intangible Assets* (IIA) memiliki nilai yang tidak jauh berbeda antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Sedangkan faktor yang memiliki nilai cukup berbeda antara kawasan perdesaan dan perkotaan adalah faktor *Economic Institutional Assets* (EIA) dan *Public Tangible Assets* (PTA).

Faktor *Economic Institutional Assets* (EIA) di bagian wilayah perkotaan sebesar 1,02, sedangkan dibagian wilayah perdesaan hanya 0,48. Artinya, akses ke pasar, akses ke pekerjaan, ketersediaan akses ke sumber modal keuangan dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup di bagian wilayah perdesaan masih kurang ketersediaannya sehingga perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketimpangan.

Hal yang sama juga terjadi pada faktor *Public Tangible Assets* (PTA), nilai indeks pada bagian wilayah perdesaan dan bagian wilayah perkotaan memiliki selisih yang cukup besar, yaitu 0,54 untuk bagian wilayah perkotaan dan 0,26 untuk bagian wilayah perdesaan. Rendahnya nilai *Public Tangible Assets* (PTA) di bagian wilayah perdesaan menunjukkan bahwa masih kurangnya ketersediaan variabel *Public Tangible Assets* (PTA), yaitu akses ke jalan arteri dan atau kolektor,

kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan, kawasan studi lingkungan, kawasan konservasi, fasilitas kesehatan, kualitas dan kuantitas air bersih, Fasilitas pengelolaan limbah domestik dan fasilitas pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bagian wilayah perdesaan perlu mengutamakan pembangunan pada variabel-variabel pembentuk faktor *Economic Institutional Assets* (EIA) dan *Public Tangible Assets* (PTA).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, diketahui bahwa nilai *Community Capability Index* (CCI) di bagian wilayah perkotaan Kabupaten Berau lebih besar dibanding bagian wilayah perdesaan Kabupaten Berau. Nilai CCI di bagian wilayah perkotaan adalah 0,11 sedangkan nilai CCI di bagian wilayah perdesaan sebesar 0,09. Adapun hasil evaluasi ketimpangan yang dilakukan dengan pendekatan kapabilitas menunjukkan indeks ketimpangan sebesar 0,91, artinya terdapat ketimpangan yang tinggi antar bagian wilayah di Kabupaten Berau.

Apabila dilihat dari variabel aset, kelompok aset yang memiliki perbedaan signifikan antara bagian wilayah perdesaan dan bagian wilayah adalah *Economic Institutional Assets* (EIA) dan *Public Tangible Assets* (PTA). Berdasarkan hal tersebut, untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bagian wilayah perdesaan perlu mengutamakan pembangunan pada kelompok aset *Economic Institutional Assets* (EIA) dan *Public Tangible Assets* (PTA). Artinya, pemerintah perlu meningkatkan kualitas dan/atau kuantitas jalan arteri dan kolektor, sumber daya alam dan lingkungan, kawasan studi lingkungan, kawasan konservasi, fasilitas kesehatan, air bersih, fasilitas pengelolaan limbah domestik dan fasilitas pendidikan. Selain itu pemerintah juga perlu mempermudah akses masyarakat ke pasar, akses ke sumber modal keuangan, akses ke lapangan pekerjaan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup.

5. Saran

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan jumlah responden yang mengakibatkan karakteristik sampel tiap bagian wilayah terlalu sedikit sehingga tidak dapat digeneralisasi. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya penelitian serupa dengan jumlah responden lebih banyak. Selain itu, diperlukan adanya penelitian lebih lanjut yang membahas arahan pembangunan kewilayahan untuk mengurangi ketimpangan antar bagian wilayah, baik menggunakan pendekatan kapabilitas maupun pendekatan lainnya.

Daftar Pustaka

- BAPPEDA. (2020). *Analisis Ketimpangan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur 2020*. 1–42.
- Fauzan, Alim. (2020). *Capability Approach for Evaluating Minapolitan Program In Klaten Regency, Central Java Province, Indonesia*. (Thesis). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Firdaus, M. (2013). *Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Indonesia: Fakta dan Strategi Inisiatif*. *Orasi Ilmiah*, 54.
- JICA. (1996). Chapter 4 Effective Approaches for Rural Development 1.
- Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD (2001). *The well-being of nations: the role of human and social capital*. Paris: Centre for Educational Research and Innovation, Organisation for Economic Co-operation and Development. p. 9. ISBN

9789264185890.

- Pramono, R. W. D. (2016). Capability Approach for well-being Evaluation in Regional Development Planning Case Study in Magelang Regency, Central Java, Indonesia.
- Pramono, R. W. D. (2020). Evaluasi Dan Perencanaan Pembangunan Wilayah Dengan Pendekatan Kapabilitas. Sleman: Deepublish.
- Pramono R, Nurfajrina IA, Nariswari N. (2019). Aspek-Aspek Pembentuk Kualitas Tempat Berdasarkan Survei Kapabilitas: Determinan bagi Kebahagiaan Masyarakat. TATALOKA. 21(1):153.
- Rahman, A. (2018). Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(1), 17–36. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JMPB/article/view/485>
- Raymond, C. M., & Cleary, J. (2013). A tool and process that facilitate community capacity building and social learning for natural resource management. *Ecology and Society*, 18(1). <https://doi.org/10.5751/ES-05238-180125>
- Santipolwut, S., Bejranonda, S., & Udomwitid, S. (2011). The Development of Community Empowerment Indicators and Its Application in Thailand. Shanghai International Conference on Social Science (SICSS), Agustus 2011, 1–8. <https://doi.org/10.13140/2.1.2656.4806>
- Sen, A. (2000). Development as freedom. 384.
- Simbolon, T. R. (2017). *Analisa Keterkaitan Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sumatera*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/xzmr9>
- Sutarno, & Kuncoro, M. (2003). Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Kecamatan Di Kabupaten Banyumas, 1993-2000. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2 Desember), 97–110. <http://www.jurnal.uui.ac.id/JEP/article/view/630/560>
- Tarigan, A. (2003). Rural - Urban Economic Linkages: Konsep dan Urgensinya dalam Memperkuat Pembangunan Desa. *Perencanaan Pembangunan*, 30, 30–43.
- Warda, N., Elmira, E., Rizky, M., Nurbani, rachma indah, & Izzati, ridho al. (2019). Dinamika Ketimpangan dan Penghidupan di Perdesaan Indonesia 2006 – 2016. *The SMERU Research Institute, November 2019*, 61.
- Williamson, J. G. (1965). Regional Inequality and the Process of National Development, *Development and Cultural Change* 133-45.